

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Meningkatkan Partisipasi Sosial.

Berdasarkan hasil dalam wawancara dan observasi, ada beberapa peran pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial yaitu:

- a. Peningkatan Kesadaran: Pendidikan kewarganegaraan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kesadaran ini mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan politik. Seperti yang diungkapkan oleh Pradipto & Utomo (2020) dalam studi mereka mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yang menekankan pentingnya pemahaman konsep dasar kewarganegaraan untuk mendorong partisipasi aktif.
- b. Pengembangan Keterampilan: Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dilatih untuk mengembangkan keterampilan kritis, analitis, dan komunikasi. Keterampilan ini penting untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, debat, dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Tanpa keterampilan ini, partisipasi mungkin menjadi kurang efektif atau bahkan tidak ada sama sekali. Penekanannya adalah pada pengembangan literasi kewarganegaraan, yang mencakup kemampuan untuk memahami dan menanggapi isu-isu sipil dan politik secara rasional (Ichsan & Prasetyo, 2021).
- c. Pembentukan Sikap Positif: Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan saling menghormati. Sikap positif ini memperkuat ikatan sosial dan mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Menurut penelitian oleh Wiranata (2018), pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika dapat secara signifikan meningkatkan kepedulian sosial dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

- d. fasilitasi Dialog dan Diskusi: Pendidikan kewarganegaraan menciptakan ruang untuk dialog dan diskusi tentang isu-isu sosial dan politik. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi pada solusi. Adnan (2020) menyoroti bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membekali individu dengan kemampuan berdialog dan berdiskusi secara konstruktif, yang esensial untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.
- e. Pemberian Akses Informasi: Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan publik, hak-hak warga, dan cara berpartisipasi, pendidikan kewarganegaraan memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah aktif. Pentingnya literasi informasi dalam mendorong partisipasi politik ditekankan oleh penelitian-penelitian modern yang menunjukkan bahwa akses mudah ke informasi yang kredibel meningkatkan kepercayaan publik dan keinginan untuk terlibat (Putra & Hidayat, 2019).

4.2 Kendala Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Meningkatkan Partisipasi Sosial.

Berdasarkan hasil dalam wawancara dan observasi ada beberapa kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan partisipasi sosial di Desa Holi. Kendala kendala ini mencakup aspek kognitif, sosial, budaya, dan struktural yang saling memengaruhi.

Pertama, rendahnya pemahaman awal warga terhadap konsep pendidikan kewarganegaraan menjadi tantangan utama. Sebagian besar warga menganggap pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai materi sekolah formal semata, bukan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi pemisahan antara pendidikan dan praktik kewarga negaraan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan pandangan Arifin (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya instrumen pendidikan formal, tetapi wahana strategis untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Kedua, terjadi ketimpangan dalam partisipasi sosial berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Warga usia produktif dan berlatar belakang pendidikan

menengah cenderung lebih aktif dalam kegiatan komunitas dibandingkan warga yang lebih tua atau berpendidikan rendah. Mereka lebih mudah memahami konsep-konsep kewarganegaraan dan merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam diskusi atau forum musyawarah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas sosial di dalam komunitas itu sendiri, yang dapat memperlemah kohesi sosial apabila tidak diatasi secara strategis.

Ketiga, kendala juga muncul dari penggunaan bahasa dan istilah yang tidak familiar bagi masyarakat. Istilah seperti “demokrasi partisipatif”, “hak sipil”, atau “pengawasan warga” dianggap terlalu abstrak bagi sebagian peserta pelatihan. Kurangnya adaptasi terhadap bahasa lokal menghambat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Sebagaimana disampaikan oleh Sari dan Abdullah (2021), pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang tidak mempertimbangkan aspek kebahasaan dan kultural sering kali gagal menyentuh lapisan masyarakat akar rumput.

Keempat, kurangnya fasilitator yang mampu menjembatani konsep dengan konteks lokal menjadi kendala tersendiri. Beberapa pelatihan disampaikan dengan metode ceramah tanpa melibatkan peserta secara aktif. Padahal, pemberdayaan masyarakat menuntut pendekatan dialogis dan partisipatif. Ramdani dan Suryani (2022) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis komunitas akan efektif jika dikemas secara kontekstual dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menyusun solusi atas persoalan bersama.

Kelima, terbatasnya dukungan infrastruktur dan anggaran juga menghambat pelaksanaan program secara berkelanjutan. Beberapa kegiatan pelatihan terpaksa ditunda karena ketiadaan tempat yang layak, alat bantu visual, maupun dana operasional. Minimnya komitmen dari pemerintah desa dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan pemberdayaan ini menunjukkan bahwa belum semua pihak pendidikan memahami pentingnya kewarganegaraan sebagai investasi sosial jangka panjang (Wulandari, 2021).

Meskipun demikian, adaptasi terhadap tantangan tersebut mulai dilakukan. Misalnya, penggunaan bahasa daerah, pendekatan naratif melalui cerita rakyat, dan pengaitan materi dengan nilai-nilai adat serta agama terbukti

mampu menjembatani pemahaman masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan penyampaian pesan, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara nilai-nilai kewarganegaraan dengan identitas budaya lokal. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Nugraha (2021) yang menunjukkan bahwa integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran nilai dan sikap demokratis di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memang memiliki potensi transformasional, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis lokal agar nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi dalam praktik sosial sehari-hari. Dengan mengatasi berbagai kendala yang ada, pendidikan kewarganegaraan akan semakin berperan dalam menciptakan masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial.

4.3 Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Meningkatkan Partisipasi Sosial.

Berdasarkan hasil dalam wawancara dan observasi ada beberapa upaya konkret dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan partisipasi sosial:

- a) Pengembangan Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual: Pendidikan kewarganegaraan perlu dirancang agar sesuai dengan konteks lokal dan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat. Materi pelajaran tidak boleh hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus mencakup studi kasus nyata, proyek komunitas, dan simulasi yang memungkinkan peserta didik menerapkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, lingkungan di membahas masalah desa setempat dan merumuskan solusi bersama dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.
- b) Penggunaan Metode Pembelajaran Interaktif dan Partisipatif: Metode ceramah satu arah kurang efektif dalam menumbuhkan partisipasi.

Sebaliknya, pendekatan yang melibatkan diskusi kelompok, debat, role-playing, kunjungan lapangan, dan proyek kolaboratif akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama. Ini sejalan dengan konsep "laboratorium demokrasi" di mana sikap dan perilaku demokratis dikembangkan melalui partisipasi.

- c) **Penanaman Nilai-Nilai Kritis dan Kebangsaan:** Pendidikan kewarganegaraan harus secara konsisten menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, musyawarah mufakat, gotong royong, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini membentuk karakter warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi partisipasi sosial yang konstruktif.
- d) **Peningkatan Literasi Digital dan Media:** Di era informasi yang masif, kemampuan untuk menyaring, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab menjadi krusial. Pendidikan kewarganegaraan harus membekali masyarakat dengan literasi digital agar mereka dapat mengidentifikasi berita palsu (hoaks), berpartisipasi dalam diskusi online secara produktif, dan menggunakan media sosial sebagai alat untuk advokasi sosial. Hal ini akan mendorong partisipasi yang lebih cerdas dan terinformasi.
- e) **Keterlibatan Komunitas dan Pihak Eksternal:** Pemberdayaan tidak hanya terjadi di dalam kelas. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan tokoh masyarakat dapat memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik dan masyarakat luas untuk terlibat dalam kegiatan sosial nyata. Contohnya adalah kegiatan sukarela membersihkan lingkungan, program kesejahteraan sosial, atau forum diskusi publik tentang isu-isu lokal.
- f) **Pembentukan Agen Perubahan:** Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan membentuk warga negara yang patuh, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengkritisi ketidakadilan dan memperjuangkan perbaikan sosial. Ini berlaku khususnya untuk mahasiswa sebagai "agen perubahan sosial dan pengawal demokrasi" yang perlu dibekali dengan

pemahaman kewarganegaraan yang mendalam dan kemampuan berpikir kritis untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum yang adil.